



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Analisis Kebuntuan Negosiasi Yang Terjadi Dalam Konflik  
Antara India Dan Pakistan Terkait Sengketa Wilayah  
Kashmir**

Skripsi

Oleh

Dedi Yusuf

6091801123

Bandung

2022



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Analisis Kebuntuan Negosiasi Yang Terjadi Dalam Konflik  
Antara India Dan Pakistan Terkait Sengketa Wilayah  
Kashmir**

Skripsi

Oleh

Dedi Yusuf

6091801123

Pembimbing

Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Dedi Yusuf  
Nomor Pokok : 6091801123  
Judul : Analisis Kebuntuan Negosiasi yang terjadi dalam Konflik antara India dan Pakistan terkait Sengketa Wilayah Kashmir

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 23 Juni 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

P'dil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

**Sekretaris**

Putu Agung Nara Indra, S.IP., M.Sc.

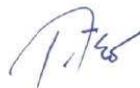
: 

**Anggota**

Vrameswari Omega W., .SIP., M.Si.(Han)

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Dedi Yusuf

NPM: 6091801123

Jurusan/Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional

Judul: Analisis Kebuntuan Negosiasi yang terjadi dalam Konflik antara India dan Pakistan terkait Sengketa Wilayah Kashmir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Juni 2022.



(Dedi Yusuf)

## ABSTRAK

Nama: Dedi Yusuf

NPM: 6091801123

Judul: Analisis Kebuntuan Negosiasi Yang Terjadi Dalam Konflik Antara India Dan Pakistan Terkait Sengketa Wilayah Kashmir

---

Konflik Sengketa wilayah Kashmir, yang dilakukan oleh India dan Pakistan telah berlangsung sepanjang lebih dari 70 tahun. Untuk menyelesaikan masalah sengketa wilayah Kashmir tersebut, kedua negara telah melakukan berbagai macam negosiasi. Tetapi, seringkali negosiasi yang dilakukan oleh India dan Pakistan berujung pada kebuntuan (*deadlock*) yang mengakibatkan konflik India dan Pakistan terhadap isu tersebut masih belum terselesaikan. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan penelitian “Mengapa India dan Pakistan masih mau melakukan negosiasi meskipun seringkali negosiasi tersebut diakhiri dengan kebuntuan ?” penulis akan menjawabnya dengan menggunakan konsep Negosiasi dalam Resolusi Konflik serta Kematangan “*Ripeness*” dalam Konflik oleh I William Zartman, dan Konsep Kebuntuan dalam Dinamika Negosiasi oleh Guy Oliever Faure. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebuntuan yang terjadi didalam negosiasi antara India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor eksternal, internal, struktural dan proses, perilaku serta strategis. Selain itu, penulis juga menyimpulkan bahwa India dan Pakistan masih ingin melakukan Negosiasi terkait dengan sengketa wilayah Kashmir karena konflik tersebut sudah dalam keadaan matang atau “*ripe*”, dimana kedua negara telah merasakan adanya *Mutually Hurting Stalemate* (MHS) dan *Way Out* (WO), yang membuat mereka ingin melakukan negosiasi. Tetapi, matangnya konflik tersebut masih belum cukup untuk membuat kedua negara untuk menemukan solusi terkait konflik tersebut di dalam negosiasinya karena sedikitnya *Mutually Enticing Opportunities* (MEO) yang diberikan oleh kedua negara membuat negosiasi menjadi gagal dan seringkali diakhiri dengan kebuntuan.

**Kata Kunci:** India, Pakistan, Kashmir, Konflik, Negosiasi, Kebuntuan (*Deadlock*)

## ABSTRACT

Name: Dedi Yusuf

NPM: 6091801123

Judul: Analysis on the Deadlock that occurred within the Negotiation between India and Pakistan regarding the dispute on Kashmir

---

*The dispute over the Kashmir region, which is fought by India and Pakistan, has been going on for more than 70 years. To resolve the dispute over the Kashmir region, the two countries have carried out various kinds of negotiations. However, often the negotiations carried out by both countries end in a deadlock which results in the conflict still not being resolved. Therefore, to answer the research question "Why are India and Pakistan still willing to negotiate even though the negotiations often end in a deadlock?" The writer will answer it by using the concept of Negotiation in Conflict Resolution and Ripeness in Conflict by Ira William Zartman, and the concept of Deadlock in Negotiation Dynamics by Guy Oliver Faure. Therefore, this research concludes that the deadlock that occurred in the negotiations between India and Pakistan regarding the Kashmir dispute was caused by several factors, namely external, structural, and process, behavior and strategies. In addition, the author also concludes that India and Pakistan still want to carry out negotiations related to the Kashmir dispute because the conflict is already ripe, where throughout the conflict, both countries have felt the existence of Mutually Hurting Stalemate (MHS) and Way Out, which makes them want to negotiate to solve the conflict. However, the ripeness within the conflict is not enough for both countries to find solution from negotiation due to the lack of Mutually Enticing Opportunities (MEO) provided by the two countries, during negotiations between India and Pakistan which caused the negotiation often ended in deadlock.*

**Keywords: India, Pakistan, Kashmir, Conflict, Deadlock, Negotiation**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkah-Nya yang telah mendorong saya agar dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul “Analisis Kebuntuan Negosiasi yang terjadi dalam Konflik antara India dan Pakistan terkait Sengketa Wilayah Kashmir”. Penulisan penelitian ini ditujukan untuk menyelesaikan program pendidikan strata-I program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kebuntuan dalam negosiasi India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir serta menganalisis alasan kedua negara tersebut masih melakukan negosiasi meskipun seringkali negosiasi tersebut diakhiri dengan kebuntuan. Selain itu penelitian ini juga ditujukan untuk membantu pembaca memahami kondisi saat ini mengenai konflik India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir serta berbagai upaya negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua negara untuk menyelesaikan konflik tersebut yang seringkali diakhiri dengan kebuntuan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan didalam skripsi ini dalam hal substansi ataupun teknis penulisan dikarenakan keterbatasan kemampuan, ilmu, dan sarana yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang konstruktif dapat menjadi pengetahuan yang berharga bagi penulis agar penulis dapat membuat penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat membantu penyusunan skripsi ini, terutama dosen pembimbing Mas Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc yang telah membantu dan memberikan saran-saran yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi. Saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua serta teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan saya semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Bandung, 14 Juni 2022

(Dedi Yusuf)

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.2.1 Pembatasan Masalah .....	10
1.2.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Kajian Literatur .....	12
1.5 Kerangka Pemikiran .....	17
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	26
1.6.1 Metode Penelitian.....	26
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	27
1.7 Sistematika Pembahasan .....	28
BAB 2 .....	30
KONFLIK, NEGOSIASI, SERTA KEBUNTUAN DALAM NEGOSIASI INDIA DAN PAKISTAN TERKAIT SENGKETA WILAYAH KASHMIR .....	30
A. Konflik dan Negosiasi India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir .....	30
A.1 Masalah Utama “ <i>Core Issues</i> ” Konflik India dan Pakistan terkait isu sengketa wilayah Kashmir .....	30

A.2 Konflik India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir serta negosiasi yang diakhiri dengan faktor eksternal .....	33
A.2.1 Keterlibatan Pakistan dalam Pemberontakan di Kashmir sejak tahun 1989 dan Perang Kargil pada tahun 1999 .....	33
A.2.2 Negosiasi India dan Pakistan di KTT Agra (2001) .....	36
A.2.3 Terorisme dan Peningkatan Pergerakan Militer India dan Pakistan sepanjang Garis Kontrol pada tahun 2001-2002 .....	38
A.2.4 Negosiasi dalam bentuk Dialog Gabungan India-Pakistan (2003-2008).....	39
A.2.5 Pelanggaran Gencatan Senjata oleh India dan Pakistan di Garis Kontrol Kashmir pada tahun 2013-2015.....	43
A.2.6 Upaya memulai kembali negosiasi India-Pakistan terkait isu Kashmir (2015-2016).....	44
B. Kebuntuan dalam Negosiasi India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir.....	47
B.1 Indikator yang memperlihatkan terjadinya kebuntuan dalam negosiasi India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir .....	47
B.1.1 Indikator kebuntuan yang muncul dalam Negosiasi India-Pakistan tahun 2001-2008 .....	48
B.1.2 Indikator kebuntuan yang muncul dalam Negosiasi India Pakistan tahun 2003-2008 .....	51
B.1.3 Indikator kebuntuan yang muncul dalam Negosiasi India Pakistan tahun 2015-2016 .....	54
B.2 Faktor penyebab kebuntuan dalam negosiasi India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir .....	56
B.2.1 Faktor Struktural .....	57
B.2.1.1 Luas wilayah serta Populasi yang dimiliki India dan Pakistan.....	58
B.2.1.2 Perekonomian yang dimiliki oleh India dan Pakistan .....	59
B.2.1.3 Persenjataan Nuklir serta Kebijakan penggunaan Nuklir India dan Pakistan .....	61
B.2.1.4 Grup-Grup militan terorisme bersenjata dalam Pakistan.....	63
B.2.2 Faktor Proses .....	66
B.2.3 Faktor Perilaku .....	67
B.2.4 Faktor Strategis.....	71
C. Keinginan untuk tetap melakukan Negosiasi oleh India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir .....	73
BAB 3 .....	75

ANALISIS PENYEBAB INDIA DAN PAKISTAN MEMILIH UNTUK TETAP MELAKUKAN NEGOSIASI TERKAIT SENGKETA WILAYAH KASHMIR .....	75
A. <i>Mutually Hurting Stalemate</i> (MHS) yang dirasakan oleh India dan Pakistan.....	76
A.1 Jumlah korban jiwa terutama pasukan militer dari kedua negara yang diakibatkan oleh konflik antara India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir .....	77
A.2 Dampak konflik India dan Pakistan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat .....	82
A.3 Upaya berulang untuk mengeskalasikan konflik yang gagal mencapai keuntungan yang menentukan bagi Pakistan .....	86
A.3.1 Operasi Gibraltar .....	87
A.3.2 Operasi Kargil .....	89
A.3.3 “State-Sponsored Terrorism” oleh Pakistan.....	90
A.4 Situasi kekuatan simetris antara India dan Pakistan.....	94
B. Keinginan untuk <i>Way Out</i> (WO) dari India dan Pakistan .....	96
B.1 Keinginan <i>Way Out</i> (WO) oleh India dan Pakistan sebelum terjadinya negosiasi tahun 2001.....	97
B.2 Keinginan <i>Way Out</i> (WO) oleh India dan Pakistan sebelum terjadinya negosiasi tahun 2003-2008 .....	98
B.3 Keinginan <i>Way Out</i> (WO) oleh India dan Pakistan sebelum terjadinya negosiasi tahun 2015-2016 .....	99
C. <i>Mutually Enticing Opportunities</i> (MEO) yang diberikan oleh India dan Pakistan.....	100
C.1 MEO dalam negosiasi India dan Pakistan pada tahun 2001 .....	101
C.2 MEO dalam negosiasi India dan Pakistan pada tahun 2003-2008.....	103
C.3 MEO dalam negosiasi India dan Pakistan pada tahun 2015-2016.....	105
C.4 Pengaruh faktor kebuntuan dalam insentif MEO India dan Pakistan yang diberikan ketika negosiasi terkait isu sengketa wilayah Kashmir berlangsung.....	107
D. Kematangan atau “ <i>Ripeness</i> ” dalam Konflik India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir .....	108
BAB 4 .....	113
KESIMPULAN.....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	121

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Pengeluaran Militer India dan Pakistan (per 1 juta U.S Dollar).....	83
Tabel 1.2 Presentase pendanaan militer dalam pengeluaran pembelanjaan pemerintah India dan Pakistan.....	84

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Linimasa Konflik dan Negosiasi India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir.....	73
--	----

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik sengketa wilayah Kashmir merupakan salah satu konflik yang masih berlangsung hingga tahun 2022. Dalam kasus ini, terdapat dua aktor negara yang terlibat dalam konflik yakni India dan Pakistan. Konflik ini muncul dengan dasar klaim kedua pihak, yakni India dan Pakistan untuk mengambil alih wilayah Kashmir sebagai wilayah mereka secara keseluruhan. Konflik antara kedua negara pertama kali terjadi pada tahun 1947 dan konflik terbaru kali ini terjadi pada tahun 2020 sampai 2021, di mana telah terjadinya pertempuran antara pasukan India dan Pakistan di garis kontrol wilayah Kashmir (LoC).<sup>1</sup> Menurut India, pertempuran terbaru tersebut dimulai ketika pasukan India menggagalkan upaya infiltrasi pasukan Pakistan di wilayah utara Kashmir.<sup>2</sup> Tetapi, menurut Pakistan, mereka memulai pertempuran karena mereka merespons penembakan tanpa alasan yang dikeluarkan oleh pasukan India.<sup>3</sup> Pada bulan November tahun 2020, India dan Pakistan telah mengeluarkan pernyataan bersama, di mana kedua pihak telah melakukan diskusi mengenai penetapan saluran “hotline”, di

---

<sup>1</sup>“India, Pakistan report deadly violence along Kashmir border”. Aljazeera, <https://www.aljazeera.com/news/2020/11/13/pakistan-summons-top-indian-diplomat-over-Kashmir-violence> (Diakses pada 12 Maret 2022).

<sup>2</sup>Fayaz Bukhari, Abu Arqam Naqash, “Indian and Pakistani troops exchange fire, at least 15 dead”. Reuters, <https://www.reuters.com/article/uk-india-pakistan/indian-and-pakistani-troops-exchange-fire-at-least-15-dead-idUKKBN27T22H?edition-redirect=uk> (Diakses pada 12 Maret 2022).

<sup>3</sup> *Ibid.*,

mana kedua pihak sepakat untuk mematuhi secara ketat semua perjanjian perdamaian dan gencatan senjata yang telah dibuat, terutama perjanjian gencatan senjata yang dibuat dan disepakati kedua pihak pada tahun 2003 dan komitmen tersebut akan berlaku pada tengah malam tanggal 25 Februari 2021.<sup>4</sup> Selain itu, penetapan saluran tersebut juga akan digunakan untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang dimiliki kedua pihak di masa depan.

Konflik antara kedua negara tersebut juga telah membuat semakin buruknya hubungan antara kedua pihak secara umum. Buruknya hubungan antara India dan Pakistan dapat dilihat dari rasa ketidakpercayaan yang muncul dari masyarakat kedua pihak terhadap satu sama lain. Berdasarkan dari survey penelitian *Pew Research Centre* pada tahun 2011 terkait bagaimana masyarakat India dan Pakistan melihat satu sama lain, sekitar 75% masyarakat Pakistan yang mengikuti survey tersebut melihat masyarakat India dalam sisi perspektif yang negatif.<sup>5</sup> Sedangkan, sekitar 65% masyarakat India yang juga mengikuti survey tersebut melihat masyarakat Pakistan dalam sisi perspektif yang negatif. Hal tersebut memperlihatkan bahwa dengan beberapa puluh tahun terjadinya perang dan konflik antara satu sama lain telah membuat masyarakat kedua pihak melihat satu sama lain dari sisi perspektif yang negatif serta penuh dengan kecurigaan. Selain itu, buruknya hubungan antara India dan

---

<sup>4</sup>Salman Masood, Mujib Mashal, dan Hari Kumar, "Pakistan and India Renew Pledge on Cease-Fire at Troubled Border", *New York Times*, <https://www.nytimes.com/2021/02/25/world/asia/pakistan-india-ceasefire.html> (Diakses pada 12 Maret 2022).

<sup>5</sup>"How Pakistanis and Indians View Each Other", *Pew Research Centre*, <https://www.pewresearch.org/global/2011/06/21/chapter-6-how-pakistanis-and-indians-view-each-other/> (Diakses pada 12 Maret 2022).

Pakistan secara umum juga dapat dilihat dari hubungan perdagangan yang dimiliki oleh kedua pihak, di mana meskipun India memberikan status Most Favoured Nation kepada Pakistan sejak tahun 1996 untuk memastikan perdagangan antara kedua negara yang non-diskriminatif, Pakistan tidak memberikan status MFN kepada India karena rasa ketidakpercayaan mereka kepada India.<sup>6</sup> Status MFN ini juga pada akhirnya dicabut oleh India pada tahun 2019 karena serangan teroris yang terjadi di wilayah India yakni Pulwama, yang disebabkan oleh grup teroris JeM (Jaish-e-Mohammed) yang berasal dari Pakistan.<sup>7</sup>

Selain itu, pencabutan Artikel 370 oleh India yang memberikan status otonomi spesial bagi wilayah Kashmir yang diduduki oleh India yakni wilayah Jammu dan Kashmir telah mendorong Pakistan untuk mengurangi hubungan diplomatik dengan India dan bahkan menahan perdagangan bilateral antara kedua negara.<sup>8</sup> Kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara tersebut telah membuat hubungan perdagangan antara kedua pihak menurun secara drastis bahkan terhenti, di mana di satu sisi ekspor Pakistan terhadap India telah menurun sebesar 90%.<sup>9</sup> Sedangkan, di sisi lain ekspor

---

<sup>6</sup>“India withdraws Most Favoured Nation status to Pakistan: What it means”, India Today, <https://www.indiatoday.in/india/story/india-withdraws-most-favoured-nation-status-to-pakistan-what-it-means-1456746-2019-02-15> (Diakses pada 12 Maret 2022).

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> Jessie Yeung, Sophia Saifi, “Pakistan downgrades diplomatic ties, suspends trade with India over Kashmir”, CNN, <https://edition.cnn.com/2019/08/07/asia/kashmir-pakistan-response-intl-hnk/index.html> (Diakses pada 12 Maret 2022).

<sup>9</sup> Dipanceta Das, “Pakistan’s Export To India Dipped 90.4% After Suspension Of Trade Ties Between Nations”, Republic World, <https://www.republicworld.com/india-news/general-news/pakistans-export-to-india-dipped-90-dot-4-percent-after-suspension-of-trade-ties-between-nations.html> (Diakses pada 12 Maret 2022).

India terhadap Pakistan telah menurun sebesar 60% dan import India terhadap Pakistan juga telah menurun sebesar 97%.<sup>10</sup>

Selain dari sisi sosial dan ekonomi, hubungan antara India dan Pakistan secara diplomatis telah mengalami stagnasi, di mana masih belum ada usaha diplomatik yang konkrit dilakukan oleh kedua pihak secara bersama untuk normalisasi kembali hubungan antara kedua negara. Stagnasi ini terjadi karena salah satu pihak yakni Pakistan hanya dapat melakukan pembicaraan dengan India dengan suatu syarat, di mana pada bulan Juni tahun 2021, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan bahwa Pakistan hanya akan dapat melakukan dialog dengan India jika mereka memberikan "*roadmap*" terhadap pemulihan kembali status otonomi wilayah Kashmir yang diperebutkan kedua pihak yang telah dicabut oleh India melalui pencabutan artikel 370 pada tahun 2019 yang dilihat oleh Pakistan sebagai kebijakan yang ilegal.<sup>11</sup>

Sedangkan, India menyatakan bahwa mereka memiliki keinginan untuk memiliki hubungan baik dengan Pakistan, dengan syarat bahwa Pakistan dapat membuat situasi kondusif yang bebas dari kekerasan dan terorisme dengan melakukan aksi yang kredibel agar wilayah yang dikuasainya tidak digunakan untuk terorisme lintas batas

---

<sup>10</sup>Prabha Raghavan, "Explained: Why is Pakistan lifting its ban on Indian imports?", Indian Express, <https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-pakistan-wants-to-lift-its-ban-on-cotton-sugar-imports-from-india-7252808/> (Diakses pada 12 Maret 2022).

<sup>11</sup>Gibran Naiyyar Peshimam, "Pakistan premier ready for India talks if given Kashmir roadmap", Reuters, 4 Juni 2021, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pakistan-premier-ready-india-talks-if-given-kashmir-roadmap-2021-06-04/> (Diakses pada 12 Maret 2022).

negara.<sup>12</sup> Selain itu, sejak pada tahun 2019 India juga lebih mementingkan memperkuat penjagaan di wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India, yakni wilayah Jammu dan Kashmir melalui pengerahan pasukan serta pemutusan jalur komunikasi agar mencegah pemberontakan yang muncul dari wilayah tersebut.<sup>13</sup>

Dari aksi serta kebijakan yang dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat, terlihat konflik antara India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun dan proses penyelesaian konflik masih belum berlanjut atau terselesaikan hingga sekarang. Konflik antara kedua pihak seringkali muncul dan terhentikan tidak dengan perdamaian dan penyelesaian konflik, melainkan hanya berhenti dalam kesepakatan berbentuk gencatan senjata, yang tidak sepenuhnya menghentikan kedua pihak untuk melanjutkan konflik perebutan wilayah Kashmir tersebut. Konflik tersebut juga telah mempengaruhi hubungan India dan Pakistan secara umum, di mana akibat dari konflik tersebut telah membuat masyarakat kedua negara saling curiga dan tidak percaya satu sama lain, hubungan perdagangan dan perekonomian antara kedua negara terhenti, dan bahkan hubungan diplomatik antara kedua negara mengalami stagnasi, yang semakin mengakibatkan terjadinya kebuntuan

---

<sup>12</sup> "Desire "Normal Neighbourly" Relations With Pakistan: India At UN", NDTV, <https://www.ndtv.com/india-news/un-india-desires-normal-neighbourly-relations-wih-pakistan-says-issues-must-be-resolved-bilaterally-peacefully-2462052> (Diakses pada 12 Maret 2022).

<sup>13</sup> Mayank Bhardwaj, "India isolates Kashmir by shutting down communications as big change announced", Reuters, <https://www.reuters.com/article/us-india-Kashmir-blackout-idUSKCN1U1R7> (Diakses pada 12 Maret 2022).

atau “*deadlock*” dalam negosiasi penyelesaian konflik India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penulis melihat bahwa topik tersebut cukup menarik dan pantas untuk dianalisis dan mendorong penulis untuk menggunakan topik ini dalam penulisan penelitian penulis. Selain itu, penulis juga percaya bahwa penelitian yang dibuat terkait dengan topik ini akan memiliki tujuan untuk memberikan perspektif baru terhadap pembahasan topik ini yakni melalui perspektif kebuntuan negosiasi yang terjadi dalam konflik tersebut. Signifikansi pembahasan topik ini juga diperkuat dengan dasar bahwa konflik ini juga melibatkan salah satu negara yang merupakan sekutu vital bagi Amerika Serikat yakni India.<sup>14</sup> Pentingnya India sebagai sekutu Amerika Serikat dapat dilihat dengan bagaimana mereka melabel wilayah Asia sebagai keseluruhan, yakni dengan menggunakan sebutan “*Indo-Pacific*”.<sup>15</sup>

Amerika Serikat juga melihat India sebagai sekutu penting di dalam wilayah Asia untuk melawan bangkitnya kekuatan dan pengaruh dari Tiongkok.<sup>16</sup> Sedangkan di sisi lain, Pakistan juga memiliki hubungan yang semakin baik dengan negara Tiongkok dan Russia, yang dapat dikatakan merupakan negara-negara yang memiliki hubungan

---

<sup>14</sup> Christopher Clary, “The U.S. and India face these 5 challenges. Can they depend on each other?”, The Washington Post, <https://www.washingtonpost.com/politics/2021/08/02/us-india-face-these-5-challenges-can-they-depend-each-other/> (Diakses pada 12 Maret 2022).

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> *Ibid.*,

kurang baik dengan Amerika Serikat.<sup>17</sup> Oleh karena itu, jika proses negosiasi yang terjadi dalam konflik kedua negara, yakni India dan Pakistan mengalami kebuntuan dan konflik tereskalasi menjadi perang dalam skala besar, maka negara-negara lain terutama negara-negara kuat yang memiliki hubungan dengan kedua negara tersebut seperti Amerika Serikat, China, dan Russia kemudian akan terlibat juga dalam konflik tersebut. Hal tersebut akan membuat tidak hanya stabilitas keamanan global terancam, tetapi stabilitas dalam aspek ekonomi, politik, sosial dalam skala global juga akan terancam.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sepanjang konflik antara kedua negara berlangsung, kedua pihak telah melakukan berbagai macam dialog serta negosiasi yang menghasilkan berbagai bentuk macam kesepakatan dan perjanjian. Seharusnya dengan berbagai macam usaha negosiasi dan penyelesaian konflik tersebut, konflik India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir sudah terselesaikan. Tetapi, kenyataannya meskipun mereka telah melakukan negosiasi, kedua negara masih belum dapat menyepakati solusi untuk menyelesaikan permasalahan konflik tersebut. Hasil paling signifikan dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua negara hanya merupakan perjanjian Simla dan Deklarasi Lahore. Perjanjian Simla dibuat pada bulan Juli tahun 1972, dimana terdapat pertemuan antara Perdana Menteri India saat itu yakni Indira Gandhi serta Presiden Pakistan saat itu

---

<sup>17</sup> Joy Mitra, "Russia, China and Pakistan: An Emerging New Axis?", *The Diplomat*, <https://thediplomat.com/2015/08/russia-china-and-pakistan-an-emerging-new-axis/> (Diakses pada 12 Maret 2022).

yakni Zulfiqar Ali Buttho di kota Simla, yang merupakan sebuah kota resor di wilayah perbukitan India utara.<sup>18</sup> Tujuan utama pertemuan tersebut adalah untuk memperbaiki hubungan antara India dan Pakistan serta membahas situasi sengketa wilayah Kashmir.<sup>19</sup> Pertemuan tersebut menghasilkan Perjanjian Simla, di mana perjanjian tersebut menetapkan bahwa garis gencatan senjata yang dibuat pada tanggal 17 Desember 1971 sebagai "*Line of Control (LoC)*" atau Garis Kontrol baru antara kedua negara yang tidak ingin diubah oleh India dan Pakistan secara sepihak, penyelesaian konflik atau perbedaan antara kedua negara akan dilakukan secara damai melalui cara bilateral atau cara lain yang disepakati kedua negara, dan perjanjian tersebut harus dihormati oleh kedua pihak tanpa mengurangi posisi yang diakui dari kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Sedangkan, Deklarasi Lahore dibuat pada tahun 1999 dimana deklarasi tersebut secara eksplisit menegaskan beberapa hal seperti kewajiban bersama untuk menghindari penggunaan senjata nuklir yang tidak diinginkan atau tidak sah, menegaskan kembali kecaman mereka terhadap terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan tekad mereka untuk memerangi ancaman tersebut, meningkatkan tanggung jawab untuk mengurangi ketegangan konvensional dan non-konvensional, melakukan serangkaian langkah-langkah CBMs atau "*Confidence Building Measures*" untuk memperbaiki lingkungan keamanan antara kedua negara, dan kedua negara juga

---

<sup>18</sup> Alastair Lamb, *Kashmir: A Disputed Legacy*, (England, Roxford Books, 1991), 296.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*, 296-297.

setuju bahwa pemerintah masing-masing akan mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan semua masalah yang dipersengketakan, termasuk masalah mendasar terkait dengan Kashmir.<sup>21</sup>

Dapat dilihat bahwa hasil kesepakatan perjanjian tersebut tercapai pada tahun 1972 dan 1999, dan isi dari perjanjian tersebut tidak memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik, tetapi hanya sebagai kerangka kerja bagi kedua negara untuk dapat menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hal tersebut memperlihatkan rendah atau bahkan tidak adanya konsesi substansial sepanjang mereka bernegosiasi untuk menyelesaikan konflik tersebut, dimana selain kedua kesepakatan tersebut, negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh kedua negara seringkali diakhiri dengan kebuntuan. Tetapi, terdapat juga anomali di mana meskipun upaya penyelesaian konflik oleh kedua negara melalui negosiasi seringkali diakhiri dengan kebuntuan, kedua pihak masih memiliki keinginan untuk melakukan negosiasi dalam penyelesaian konflik sengketa wilayah Kashmir.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa ketika kedua negara bernegosiasi untuk mengatasi masalah konflik mereka terkait sengketa wilayah Kashmir, seringkali negosiasi tersebut menghasilkan substansi yang rendah atau bahkan tidak ada. Bahkan, substansi terbesar yang dicapai oleh negosiasi kedua negara terkait sengketa wilayah Kashmir adalah perjanjian Simla dan deklarasi Lahore, yang

---

<sup>21</sup> India-Pakistan Agreement: "Lahore Declaration", United Nations Peacemaker, 21 Februari 1999, <https://peacemaker.un.org/indiapakistan-lahoredeclaration99> (Diakses pada 17 April 2022).

bukan memberikan solusi tetapi hanya merupakan aturan kerangka kerja untuk kedua negara dalam menyelesaikan konflik mereka terkait sengketa wilayah Kashmir.

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Untuk penelitian ini, peneliti juga akan berfokus pada waktu-waktu di mana negosiasi yang terjadi serta kebuntuan yang muncul dalam negosiasi antara kedua pihak terkait wilayah Kashmir terjadi. Oleh karena itu, kurun waktu yang akan dipilih adalah tahun 2001-2016. Lebih tepatnya, penulis akan memilih kurun waktu negosiasi pada tahun 2001, 2003-2008, dan 2015-2016. Penulis memilih kurun waktu tersebut karena selain terjadinya negosiasi oleh India dan Pakistan yang membahas terkait isu sengketa wilayah Kashmir, kurun waktu tersebut juga mengalami kebuntuan yang diperkuat dengan adanya faktor eksternal, yakni faktor yang muncul diluar dari pihak yang terlibat dalam bentuk adanya serangan terorisme yang membuat negosiasi tersebut mengalami kebuntuan.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah dipaparkan, penulis telah menentukan pertanyaan penelitian atau "*research question*" yakni : **Mengapa India dan Pakistan tetap berusaha melakukan negosiasi penyelesaian konflik terkait dengan sengketa wilayah Kashmir meskipun upaya tersebut seringkali diakhiri dengan kebuntuan atau "*deadlock*" ?**

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa negosiasi India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir telah mengalami kebuntuan dan kebuntuan tersebut terjadi karena faktor eksternal, struktural, perilaku, proses, dan strategis. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menjelaskan bahwa alasan mengapa India dan Pakistan masih memilih untuk melakukan negosiasi dalam penyelesaian konflik mereka terkait sengketa wilayah Kashmir adalah karena mereka telah merasakan bahwa konflik tersebut telah matang atau "*ripe*", dimana kematangan tersebut dapat mendorong mereka untuk ingin melakukan negosiasi sebagai cara penyelesaian konflik. Tetapi, matangnya konflik tersebut masih belum cukup untuk membuat mereka dapat menghasilkan solusi yang substansial untuk menyelesaikan konflik mereka.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memiliki kegunaan bagi mahasiswa, akademisi, serta masyarakat publik yang tertarik dengan analisis kebuntuan negosiasi serta situasi konflik yang terjadi antara India dan Pakistan terkait dengan sengketa wilayah Kashmir yang melibatkan kedua pihak. Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini akan memperkaya studi hubungan internasional, terutama dalam bidang kajian resolusi konflik serta kajian konflik dan perdamaian.

#### 1.4 Kajian Literatur

Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang konflik berkepanjangan yang dialami oleh India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir.

##### ***Artikel An Indian Perspective oleh Neelam Deo***

Artikel ini memberikan perspektif dari pembuat keputusan bagi negara India terhadap kasus konflik sengketa wilayah Kashmir. Artikel ini berargumen bahwa wilayah Kashmir telah menjadi bagian integral dari India ketika penguasa Kashmir yakni Maharaja Hari Singh telah akses ke India melalui instrumen akses yang telah ditandatangani pada 26 Oktober 1947. Oleh karena itu, untuk dalam kasus wilayah Kashmir, ketika penguasanya telah meneruskan instrumen akses yang diterima oleh gubernur jenderal India, negosiasi terkait pertanyaan tentang akses Kashmir ke India secara legal tidak mungkin dapat terjadi. Selain itu, artikel ini juga berargumen bahwa Pakistan telah secara konsisten menyesatkan dunia mengenai keterlibatannya di Kashmir dan menyanggah pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Pakistan terkait keterlibatannya di Kashmir.

Untuk artikel tersebut penulis kurang menyetujui argumen dari artikel terkait dengan konflik tersebut dengan dasar bahwa artikel tersebut menjelaskan situasi konflik hanya dari satu sisi perspektif, yakni dari sisi perspektif pemerintahan India. Terkait dengan Artikel ini, penelitian penulis akan melengkapi Artikel tersebut, di mana penelitian ini memiliki perspektif tidak hanya dari India, tetapi dari Pakistan juga. Menurut penulis, dengan adanya perspektif dari kedua pihak yang terlibat dalam

konflik yakni India dan Pakistan, gambaran terhadap konflik tersebut akan terlihat lebih jelas dan adanya dua perspektif tersebut juga dapat membuat penulis maupun pembaca dapat melihat konflik India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir secara objektif.

#### ***Artikel Kashmir : The Discourse in Pakistan oleh Samina Yasmeen***

Artikel ini menjelaskan bahwa bagi mayoritas penduduk Pakistan, Kashmir tetap menjadi agenda yang masih belum selesai. Artikel ini berargumen bahwa menurut Pakistan, Kashmir dipandang sebagai hadiah yang ditolak bagi Pakistan karena mekanisme kolonialis Inggris yang telah pergi dari benua Asia Selatan, pemerintahan India serta Maharaja Hari Singh dari negara bagian Kashmir. Oleh karena itu, *Instrument of Accession* yang ditandatangani oleh Maharaja Hari Singh dianggap tidak memiliki legalitas. Dengan logika tersebut, pemerintah India dianggap oleh Pakistan sebagai penjajah wilayah yang secara sah seharusnya menjadi milik Pakistan. Dengan dasar tersebut, Artikel ini kemudian berargumen bahwa terdapat tiga aliran pemikiran yang relatif berbeda tentang masalah Kashmir telah ada di lingkaran pengambilan keputusan Pakistan. Pemikiran pertama adalah mereka yang menganut aliran pemikiran ortodoks yang memandang India sebagai musuh tanpa syarat terhadap Pakistan. Pemikiran kedua adalah kaum Islamis di lingkaran pengambilan keputusan Pakistan yang telah berbagi gagasan tentang permusuhan India tanpa syarat dengan kelompok ortodoks. Sedangkan, Pemikiran ketiga adalah pemikiran atau pandangan yang dipegang oleh elemen moderat atau liberal di lingkaran pengambilan keputusan

Pakistan, dimana Mereka tidak menganggap India sebagai negara yang bermusuhan tanpa syarat terhadap Pakistan.

Untuk posisi penulis terhadap artikel ini, sama seperti artikel sebelumnya penulis tidak menyetujui argumen artikel dengan dasar bahwa artikel tersebut hanya menjelaskan konflik dari sisi satu pihak yakni Pakistan. Terkait dengan Artikel ini, penelitian penulis akan melengkapi Artikel tersebut, di mana penelitian ini memiliki perspektif tidak hanya dari Pakistan, tetapi dari India juga. Dengan adanya perspektif dari kedua pihak yang terlibat dalam konflik yakni India dan Pakistan, menurut penulis gambaran terhadap konflik tersebut akan terlihat lebih jelas dan dengan adanya dua perspektif tersebut juga dapat membuat penulis maupun pembaca dapat melihat konflik India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir secara objektif.

***Artikel Pakistan-India Relations: An Analytical Perspective of Peace Efforts***  
**oleh Muhammad Sajjad Malik**

Artikel ini menjelaskan sejarah konflik yang terjadi antara India dan Pakistan terkait dengan sengketa wilayah Kashmir, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai upaya negosiasi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan konflik tersebut. Dari penjelasan tersebut, artikel ini kemudian berargumen bahwa perang dan konflik antara India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir telah mendorong mereka untuk melakukan negosiasi penyelesaian konflik. Tetapi, negosiasi yang dilakukan oleh kedua pihak seringkali diakhiri dengan kegagalan dan kedua negara tidak dapat mencapai perdamaian dan kerjasama yang

panjang. Kemudian, artikel ini juga berargumen bahwa upaya mediasi oleh pihak ketiga merupakan upaya yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Menurut artikel tersebut, hal ini dikarenakan meskipun PBB memiliki peran penting dalam perang pertama dan perang kedua antara India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir, PBB gagal dalam menciptakan perdamaian untuk isu Kashmir. Sedangkan, untuk upaya negosiasi secara bilateral terdapat beberapa contoh yang baik dari inisiatif perdamaian bilateral yang berhasil tetapi mereka juga gagal untuk mengatasi masalah-masalah utama isu sengketa wilayah Kashmir yang diperdebatkan. Terdapat dua argumen utama dari artikel ini terkait dengan kegagalan upaya negosiasi secara bilateral, yakni tidak adanya kerangka kelembagaan untuk mengatasi ketegangan dan konflik, dan ketidakpercayaan yang mendalam antara India dan Pakistan.

Untuk posisi terhadap artikel ini penulis tidak menyetujui argumen yang dikemukakan dalam artikel ini, karena menurut penulis terdapat faktor lain selain ketidakpercayaan serta kurangnya kerangka kelembagaan yang membuat negosiasi bilateral India dan Pakistan terkait dengan sengketa wilayah Kashmir mengalami kegagalan dan kebuntuan. Penulis juga berargumen bahwa negosiasi yang dilakukan oleh India dan Pakistan itu tidak hanya mengalami kegagalan, tetapi kebuntuan juga, di mana negosiasi yang dilakukan menjadi terhenti atau buntu. Selain itu, menurut penulis negosiasi secara bilateral merupakan langkah yang paling tepat untuk saat ini karena meskipun terdapat dorongan dari PBB ataupun upaya mediasi dari pihak ketiga,

pada akhirnya kedua negara yang terlibatlah yang akan menentukan akhir dari konflik sengketa wilayah Kashmir tersebut. Terkait dengan Artikel ini, penelitian penulis akan membantah Artikel tersebut, di mana dalam penelitian ini penulis akan memperlihatkan bahwa negosiasi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut tidak hanya mengalami kegagalan, tetapi telah mengalami kebuntuan.

Dari kajian literatur yang telah dipaparkan, penulis menyetujui beberapa pernyataan dan argumen yang terdapat dalam beberapa artikel serta buku yang telah dikaji. Penulis menyetujui bahwa terdapat berbagai macam faktor penyebab terjadinya konflik antara India dan Pakistan terhadap sengketa wilayah Kashmir serta adanya perbedaan perspektif bagi India dan Pakistan terkait isu tersebut. Tetapi, dari berbagai kajian literatur yang telah dipaparkan, penulis juga melihat bahwa untuk penelitian terkait isu tersebut terlihat kurangnya pembahasan terhadap analisis bagaimana kebuntuan proses negosiasi dalam konflik India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir dapat terjadi.

Beberapa buku serta artikel yang membahas topik tersebut hanya membahas mengenai faktor konflik atau penyebab konflik, sedangkan terkait negosiasi mayoritas masih membahas mengenai analisis bagaimana serta memberikan sugesti atau saran agar negosiasi dapat menjadi lancar agar konflik tersebut dapat terselesaikan. Hal tersebut memperlihatkan adanya celah, dimana masih kurangnya pembahasan mengenai sisi negosiasi, terutama pembahasan kebuntuan dalam negosiasi dalam penelitian terkait isu sengketa wilayah Kashmir. Adanya celah pembahasan terkait

topik tersebut, yakni pembahasan mengenai kebuntuan dalam negosiasi penyelesaian konflik serta alasan mereka masih bernegosiasi menurut penulis dapat dipenuhi oleh penelitian yang penulis buat.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam sebuah penelitian, kerangka pemikiran berfungsi sebagai acuan dasar yang berguna untuk menghubungkan fakta-fakta dari sumber penelitian dan relevansinya untuk menghasilkan sebuah analisa yang menjawab pertanyaan penelitian yang telah dibuat. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah penulis buat, penulis pertama akan menggunakan teori dan konsep berupa: Konsep Negosiasi dalam Resolusi Konflik dan Kematangan “Ripeness” dalam Konflik oleh I William Zartman, dan Konsep Kebuntuan (Deadlock) dalam dinamika negosiasi oleh Guy Olivier Faure.

#### **1. Konsep Negosiasi dalam Resolusi Konflik dan Kematangan “Ripeness” dalam Konflik oleh I William Zartman**

I William Zartman menyatakan bahwa Negosiasi merupakan proses menggabungkan posisi yang bertentangan menjadi kesepakatan bersama dan merupakan cara yang paling umum walaupun bukan satu-satunya untuk mencegah, mengelola, menyelesaikan, dan mengubah konflik.<sup>22</sup> Negosiasi beroperasi di bawah aturan keputusan kebulatan dalam suara, dengan tiga pilihan: ya, tidak, atau tetap

---

<sup>22</sup>Jacob Bercovitch, Viktor Aleksandrovič Kremenúk, dan Ira William Zartman, “Conflict Resolution and Negotiation,” dalam *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*, (Los Angeles: SAGE, 2020), 322.

melanjutkan negosiasi. Oleh karena itu, Negosiasi hanya dapat menciptakan hasil yang positif, di mana tidak ada pihak yang akan menyetujui hasilnya kecuali jika merasa dirinya lebih baik daripada tanpa kesepakatan.

L. William Zartman juga menjelaskan bahwa negara akan lebih cenderung menggunakan negosiasi ketika mereka merasakan bahwa konflik yang dialami oleh kedua pihak telah mencapai situasi kematangan atau "*ripeness*".<sup>23</sup> Kondisi kematangan tersebut dapat dilihat melalui tiga elemen, yakni melalui "*Mutually Hurting Stalemate*" atau MHS, "*Way Out*" atau WO dan "*Mutually Enticing Opportunities*" atau MEO. Untuk penelitian ini, ketiga variabel tersebut tidak akan dilihat sebagai variabel yang wajib harus ada dalam suatu negosiasi, melainkan skripsi ini akan menggunakan ketiga variabel tersebut sebagai variabel yang fasilitatif, di mana semakin besar adanya MHS, WO, atau MEO maka semakin besar juga kemungkinan agar negara ingin melakukan negosiasi.

"*Mutually Hurting Stalemate*" atau MHS diartikan sebagai situasi di mana para pihak yang terlibat dalam konflik menemukan diri mereka terkunci di dalam kebuntuan, di mana mereka tidak dapat mengeskalisasi konflik tersebut menjadi kemenangan dan kebuntuan ini melukai kedua pihak.<sup>24</sup> Luka atau rasa sakit yang dirasakan oleh kedua pihak tidak harus dalam derajat yang sama atau untuk alasan yang sama. Tetapi, perlu diketahui juga bahwa MHS didasarkan pada persepsi, di mana

---

<sup>23</sup> Ibid., p.329.

<sup>24</sup> Aytekin Cantekin, "Ripeness and Readiness Theories in International Conflict Resolution", *Journal of Mediation and Applied Conflict Analysis* 3, no. 4 (2016): 418.

kedua belah pihak harus merasakan bahwa mereka berada dalam kebuntuan dan mempertahankan konflik tersebut hanya akan semakin menyakiti kedua pihak.<sup>25</sup> MHS dapat digambarkan secara singkat sebagai periode kekerasan yang panjang, di mana tidak ada satupun dari pihak-pihak yang berkonflik memiliki kemungkinan untuk konflik tersebut melalui kemenangan sepihak, yang merupakan kondisi adanya kebuntuan militer.<sup>26</sup> Selain itu, menurut Zartman, persepsi MHS juga sebagian berasal dari faktor objektif seperti upaya berulang untuk mengeskalasikan konflik yang gagal mencapai keuntungan yang menentukan bagi suatu pihak, atau malapetaka yang baru saja dihindari oleh kedua pihak.<sup>27</sup>

Selanjutnya, setelah kedua pihak yang berkonflik telah memiliki persepsi MHS, mereka terdorong untuk ingin mencari kebijakan alternatif atau *“Way Out”*.<sup>28</sup> *“Way Out”* atau WO diartikan sebagai kemampuan pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengenali negosiasi sebagai pilihan yang layak secara politis, yang masih dapat menghasilkan hasil yang sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang berkonflik, meskipun dengan mengorbankan kompromi.<sup>29</sup> Oleh karena itu, WO

---

<sup>25</sup> Patty J.L. Ouwens, “There are Two Sides to Every Coin: An analysis of the U.S. – Taliban Negotiations (2018-2019) : A reassessment of William I. Zartman’s ripeness theory with the Afghanistan conflict as a case study”, Utrecht University, (2020): 13.

<sup>26</sup> Aytekin Cartekin, “Ripeness and Readiness Theories in Internasional Conflict Resolution”, 418.

<sup>27</sup> Alan J. Kuperman, “Muscular Mediation and Ripeness Theory”, *Ethnopolitics* 21, no.2, (2022): 164, DOI: 10.1080/17449057.2022.2004777 (Diakses pada 13 Maret 2022).

<sup>28</sup> Patty J.L. Ouwens, “There are Two Sides to Every Coin: An analysis of the U.S. – Taliban Negotiations (2018-2019) : A reassessment of William I. Zartman’s ripeness theory with the Afghanistan conflict as a case study”, 12-13.

<sup>29</sup> Siniša Vuković, “Expanding Ripeness Beyond Push and Pull: The Relevance of Mutually Enticing Opportunities (MEOs)”, *Ethnopolitics* 21, no. 2, (2022): 192, DOI: 10.1080/17449057.2022.2004780 (Diakses pada 13 Maret 2022)

diperlukan untuk memulainya negosiasi karena tanpa adanya WO, dorongan yang muncul dari persepsi MHS hanya akan membuat para pihak tidak memiliki tujuan apapun.<sup>30</sup> Tetapi, perlu diketahui juga bahwa meskipun persepsi WO dapat menarik para pihak berkonflik ke arah suatu proses negosiasi, tetapi daya tarik awalnya tidak cukup untuk membuat mereka tetap berkomitmen pada proses dalam negosiasi itu sendiri.<sup>31</sup>

Setelah kedua elemen tersebut muncul, konflik akan dilihat sebagai telah matang atau "*ripe*", di mana negosiasi dapat dimulai oleh pihak yang terlibat dalam konflik. Tetapi, selama proses tersebut berlangsung para negosiator harus memberikan prospek masa depan yang lebih menarik agar dapat menarik diri mereka keluar dari negosiasi dan menuju ke dalam kesepakatan untuk mengakhiri konflik.<sup>32</sup> Hal tersebut membuat faktor pendorong, yakni MHS harus diganti dengan faktor penarik, yakni "*Mutually Enticing Opportunity*" atau MEO yang berupa formula penyelesaian dan prospek transformasi yang dirancang oleh pihak-pihak yang bernegosiasi.<sup>33</sup> Oleh karena itu, MEO harus dirumuskan dengan cara yang tidak memihak satu pihak di atas yang lain, karena gagasan mutualitas mengandaikan bahwa semua pihak harus dapat mengklaim

---

<sup>30</sup> Patty J.L. Ouwens, "There are Two Sides to Every Coin: An analysis of the U.S. – Taliban Negotiations (2018-2019): A reassessment of William I. Zartman's ripeness theory with the Afghanistan conflict as a case study", 13.

<sup>31</sup> Siniša Vuković, "Expanding Ripeness Beyond Push and Pull: The Relevance of Mutually Enticing Opportunities (MEOs)", *Ethnopolitics* 21, no. 2, (2022): 193.

<sup>32</sup> Hans Günter Brauch, dan Ira William Zartman, "Mutually Enticing Opportunities and Durable Settlements", dalam *I William Zartman: A Pioneer in Conflict Management and Area Studies*, (Switzerland: Springer, 2019), 175.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

keuntungan yang berasal dari solusi kompromi yang mereka sepakati.<sup>34</sup> Ketika persepsi MEO tidak dikembangkan dalam negosiasi, hal tersebut akan membuat negosiasi menjadi tidak stabil, meskipun para pihak mencapai kesepakatan manajemen konflik untuk menanggihkan kekerasan.<sup>35</sup>

## **2. Konsep Kebuntuan “*Deadlock*” dalam dinamika negosiasi oleh Guy Olivier Faure**

Konsep kebuntuan “*Deadlock*” dalam dinamika negosiasi yang dibuat oleh Guy Olivier Faure ditujukan untuk memberikan definisi konsep kebuntuan, mengidentifikasi asal usul dari kebuntuan tersebut serta indikator yang menunjukkan kebuntuan tersebut telah terjadi, menjelaskan berbagai macam cara atau insentif yang dapat dilakukan untuk mengatasi kebuntuan, serta mengkategorisasikan strategi untuk mengatasi kebuntuan tersebut.<sup>36</sup> Untuk penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan tiga bagian dari konsep tersebut, yakni konsep kebuntuan, indikator kebuntuan, serta analisis faktor penyebab terjadinya kebuntuan dalam negosiasi.

Penulis hanya memilih ketiga bagian tersebut karena dalam skripsi ini penulis akan menggunakan konsep ini sebagai penjelasan bahwa negosiasi yang dialami oleh India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir telah mengalami kebuntuan. Selain itu,

<sup>34</sup> Siniša Vuković, “Expanding Ripeness Beyond Push and Pull: The Relevance of Mutually Enticing Opportunities (MEOs)”, 195.

<sup>35</sup> Hans Günter Brauch, dan I William Zartman, “Mutually Enticing Opportunities and Durable Settlements”, dalam I William Zartman: A Pioneer in Conflict Management and Area Studies, 175.

<sup>36</sup> I. William Zartman dan Guy Olivier Faure, “Deadlocks in Negotiation Dynamics,” dalam *Escalation and Negotiation in International Conflicts*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 24-25.

faktor kebuntuan dalam negosiasi ini juga berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian, terutama dalam pengaruh faktor kebuntuan dalam salah satu elemen kematangan konflik, yakni *Mutually Enticing Opportunity* (MEO) India dan Pakistan ketika mereka bernegosiasi terkait sengketa wilayah Kashmir.

### **Konsep Kebuntuan (*Deadlock*)**

Guy Olivier Faure mendefinisikan konsep kebuntuan (*deadlock*) dalam negosiasi adalah bukan situasi di mana proses negosiasi telah putus yang diindikasikan dengan kegagalan negosiasi, melainkan kebuntuan (*deadlock*) menandakan situasi proses negosiasi yang terhenti atau tidak bergerak sama sekali.<sup>37</sup> Kebuntuan, terutama jika berlarut-larut dan berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai macam konsekuensi di luar sekadar proses negosiasi telah berhenti dan bahwa tidak ada lagi dinamika produktif yang terjadi di sekitar meja negosiasi.

### **Indikator Kebuntuan (*Deadlock*) dalam Negosiasi**

Situasi kebuntuan dalam negosiasi dapat terlihat ketika tidak ada pihak yang membuat konsesi lagi atau langkah apa pun yang dapat memicu dinamika negosiasi, baik itu tindakan atau kata-kata. Tetapi, banyak situasi yang tidak memiliki karakteristik yang dapat dilihat, terutama ketika melibatkan hubungan antar individu. Selain itu, dimensi budaya juga dapat membuat para aktor semakin sulit untuk menyadari bahwa mereka terjebak dalam kebuntuan. Mempertimbangkan keragaman

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 25-28.

konteks budaya. Guy Olivier Faure menyatakan bahwa terdapat indikasi yang dapat memperlihatkan bahwa negosiasi berada dalam situasi buntu (*deadlock*).<sup>38</sup> Indikator yang pertama adalah bahwa pertemuan negosiasi memiliki substansi yang rendah atau bahkan tidak ada. Kemudian, indikator yang kedua adalah pemberian jawaban dalam proses negosiasi yang sangat rumit sampai tidak dapat dipahami sama sekali. Sedangkan, indikator ketiga adalah, munculnya argumen dan penjelasan yang sama dan diulang tanpa henti. Selanjutnya, indikator terakhir adalah bahwa salah satu pihak berpura-pura tidak hadir untuk pertemuan lebih lanjut atau mengajukan alasan yang dapat diterima dan tidak menggunakan kata-kata yang tidak menyenangkan atau menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan.

#### **Faktor Penyebab Terjadinya Kebuntuan (*Deadlock*)**

Guy Olivier Faure menjelaskan bahwa terdapat lima faktor sumber penyebab terjadinya kebuntuan dalam negosiasi, yakni faktor Kognitif, Faktor Pribadi, Faktor Kontekstual, Faktor Struktural, dan Faktor Proses, Perilaku, serta Strategis.<sup>39</sup> Untuk skripsi ini, penulis hanya akan menggunakan faktor struktural, dan proses, perilaku serta strategi. Peneliti tidak menggunakan faktor kognitif, faktor pribadi dan kontekstual di dalam skripsi ini karena peneliti tidak dapat menemukan data-data yang diperlukan untuk menggunakan kedua faktor tersebut, seperti data-data yang terkait dengan kepribadian serta emosi yang dimiliki negosiator yang terlibat di dalam

---

<sup>38</sup> Ibid., 29-30

<sup>39</sup> Ibid., 31-36.

negosiasi penyelesaian konflik India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir serta data pembicaraan secara detail yang terdapat pada saat negosiasi penyelesaian konflik terjadi.

### **A. Faktor Struktural**

Menurut Guy Olivier Faure, faktor struktural merupakan faktor yang berhubungan dengan sumber daya internal yang tersedia dari kedua pihak untuk memecahkan masalah yang dipertaruhkan oleh kedua pihak yang terlibat. Untuk faktor struktural, kebuntuan terjadi karena tidak ada konsesi lebih lanjut yang dapat dibuat oleh kedua pihak karena alasan yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Elemen lain dari faktor struktur menurut Guy Olivier Faure adalah hubungan kekuatan atau "*power relations*", yang dirasakan atau nyata, yang terdapat di dalam serta dibalik kedua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Ketika kedua negara yang berkonflik memiliki situasi kekuatan yang simetris atau sama, hal tersebut akan membuat kedua pihak sangat peka terhadap perbedaan terkecil yang dapat membuat proses negosiasi mencapai kebuntuan. Sedangkan, dalam situasi kekuatan yang asimetris atau berbeda, pihak yang lebih lemah mungkin merasa lebih menguntungkan untuk melindungi kepentingannya dengan menghalangi kemajuan dari proses negosiasi dan akibatnya akan menghindari kesepakatan yang mencerminkan terhadap ketidakseimbangan kekuatan yang ada dan penghindaran tersebut dapat menyebabkan terjadinya kebuntuan dalam negosiasi.

### **B. Faktor Proses, Perilaku, serta strategis**

Menurut Guy olivier Faure, untuk faktor proses, konsesi yang dibuat terlalu cepat atau dengan ukuran yang tidak terduga dapat meningkatkan tingkat harapan pihak lain dan membuat hubungan timbal balik tidak mungkin terjadi, yang dapat membuat terjadinya kebuntuan dalam negosiasi. Sebaliknya, konsesi yang terlalu lambat atau yang terlalu kecil dapat mematahkan momentum dalam negosiasi yang bahkan dapat berdampak negatif pada proses negosiasi.

Sedangkan, untuk faktor perilaku atau "*behaviour*", kebuntuan dapat terjadi karena konsekuensi langsung dari harapan yang ditipu, janji yang tidak ditepati, atau pertukaran yang dianggap adil oleh satu pihak dan ditolak oleh pihak lain. Kebuntuan seperti itu digolongkan oleh Guy Olivier Faure sebagai prosedur pembalasan. Biasanya, prosedur pembalasan tersebut memiliki konsekuensi terbatas, karena tidak mengikat para pihak untuk memasuki proses eskalasi dalam negosiasi. Namun, jika salah satu pihak memutuskan untuk membuat pihak lain membayar perbuatan buruknya dan senang dengan gagasan bahwa setidaknya mereka akan lebih menderita, maka situasi "*lose-lose*" dapat terpicu. Situasi tersebut seringkali akan membawa negosiasi ke arah jalan buntu, karena menurut Guy Olivier Faure tampaknya sulit bagi kedua belah pihak untuk tidak mengarah pada strategi defensif, terutama untuk negosiasi satu kali atau negosiasi yang tidak sering diulang. Akibatnya, hal tersebut akan mendorong adanya sikap non-kooperatif oleh kedua pihak yang terlibat yang akan mengarah pada situasi konfliktual dan kebuntuan.

Kemudian untuk faktor strategis, menurut Guy Olivier Faure kebuntuan dalam proses negosiasi merupakan akibat langsung dari strategi balas dendam jika dinamika negosiasi menjadi koersif. Hal ini terjadi karena munculnya hubungan timbal balik yang dilakukan oleh kedua pihak dalam bentuk penolakan atau ancaman dapat menyebabkan kelumpuhan dalam proses serta sistem negosiasi. Hal tersebut dapat mengunci proses negosiasi dalam siklus permusuhan timbal balik dengan risiko eskalasi konflik yang semakin meningkat.

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis akan gunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna terkait dengan penelitian yang akan dibuat.<sup>40</sup> Oleh karena itu, penggunaan metode penelitian kualitatif oleh penulis didasarkan dengan keinginan penulis untuk mengeksplorasi dan memahami makna terkait dengan kasus kebuntuan yang terjadi dalam proses negosiasi konflik antara India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir. Metode Penelitian Kualitatif juga akan dilakukan tanpa menggunakan data numerik dalam menganalisis data. Melainkan, penulis akan menggunakan data kualitatif dalam bentuk teks yang dapat memberikan dasar untuk mengidentifikasi fitur karakteristik dari berbagai unit, tetapi mereka tidak dapat

---

<sup>40</sup> John W. Creswell dan J. David Creswell, "Chapter 1: The Selection of a Research Approach," dalam *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks, CA, U.S.A: SAGE Publications, Inc, 2018), p. 41.

dianalisis secara statistik, dan mereka tidak memberikan dasar untuk perbandingan kuantitatif antar unit.<sup>41</sup> Selain itu, penggunaan metode penelitian kualitatif oleh penulis juga akan membuat penelitian ini dilakukan dengan langkah seperti berikut: membuat pertanyaan penelitian, memilih subjek serta data yang relevan dengan penelitian, menginterpretasi data-data terkait dengan penelitian tersebut, menghubungkan data tersebut dengan teori yang penulis akan gunakan, dan kemudian penulis akan menulis kesimpulan mengenai penelitian tersebut.<sup>42</sup>

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, di mana data-data yang akan diambil dan digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa kutipan, kalimat, bahkan seluruh bagian dari dokumen tertulis yang terkait dengan topik penelitian.<sup>43</sup> Penulis juga akan menggunakan sumber data sekunder, yakni sumber data yang telah ada dan dibuat oleh para peneliti sebelumnya yang telah membahas mengenai topik penelitian.<sup>44</sup> Sumber data sekunder ini dapat muncul dalam bentuk dokumen tertulis seperti Jurnal, Literatur Akademik, Artikel, Buku, serta Berita yang membahas tentang konflik serta proses negosiasi yang terjadi antara India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir. Teknik penggalan data

---

<sup>41</sup> Sigmund Grønmo, "Types of Data," dalam *Social Research Methods: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: SAGE, 2020), 114-115.

<sup>42</sup> Alan Bryman, "The Main Steps in Qualitative Research," dalam *Social Research Methods* (Oxford, U.K: Oxford University Press, 2012), 384-386.

<sup>43</sup> Michael Quinn Patton, "The Nature of Qualitative Inquiry," dalam *Qualitative Research & Evaluation Methods* (Thousand Oaks, U.S.A: SAGE Publications, 2002), 4-5.

<sup>44</sup> Sigmund Grønmo, "Documentary Sources and Qualitative Content Analysis," dalam *Social Research Methods: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: SAGE, 2020), p. 208.

ini perlu diambil karena menurut peneliti topik ini cukup sulit untuk mendapatkan data yang berbentuk data secara langsung melalui wawancara, survey, atau discussion group. Hal ini dikarenakan skala topik penelitian ini yang cukup luas yang dapat melibatkan aktor dalam level dari masyarakat sampai tingkat negara. Sedangkan, untuk analisis data, peneliti akan menganalisis data-data dengan objektif tanpa dipengaruhi nilai peneliti. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis data yang dimiliki secara tematik, di mana peneliti akan melihat data untuk mengambil inti tema dari data tersebut dan melihat apakah inti tersebut sesuai atau terkait dengan penelitian yang akan dibuat.<sup>45</sup>

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk penelitian ini, penulis akan menjelaskan penelitian dengan susunan sebagai berikut:

Bab 1, yang berjudul **“Pendahuluan”** berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan, kajian literatur serta kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2, yang berjudul **“Konflik, Negosiasi, serta Kebuntuan dalam Negosiasi antara India dan Pakistan terkait sengketa wilayah Kashmir”** berisi tentang kronologi konflik India dan Pakistan terkait dengan sengketa wilayah Kashmir dan Upaya negosiasi India dan Pakistan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian

---

<sup>45</sup> Bryman, *Social Research Methods: Fourth Edition*, 12-13.

bab ini dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kebuntuan yang terjadi dalam negosiasi dan faktor-faktor penyebab terjadinya kebuntuan dalam negosiasi tersebut.

Bab 3, yang berjudul **“Analisis penyebab India dan Pakistan memilih untuk melakukan Negosiasi terkait sengketa wilayah Kashmir”** berisi tentang analisis penjelasan terkait dengan pertanyaan penelitian yakni mengapa kedua negara masih ingin melakukan negosiasi penyelesaian konflik meskipun seringkali diakhiri dengan kebuntuan. Penjelasan tersebut akan berdasarkan konsep *“ripeness”* dalam konflik yang menyatakan bahwa negara akan memilih negosiasi ketika konflik telah matang atau *“ripe”*. Untuk menjelaskan hal tersebut terdapat 3 variabel yang akan dijelaskan yakni, *Mutually Hurting Stalemate, Way Out, dan Mutually Enticing Opportunity*.

Bab 4, berisi **kesimpulan** yang diambil dari penelitian ini.